



KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA BONGKARAS, KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA PERIODE 2012-2023

Dosmariah Girsang ¹⁾, Tedi Erviantono ²⁾, Piers Andreas Noak ³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dosmariahgirsang@gmail.com¹⁾,

erviantono2@unud.ac.id²⁾, piersandreasnoak@unud.ac.id³⁾

Abstract (English)

Bongkaras Village is one of the villages in Silima Pungga-Pungga District, North Sumatra Province. Bongkaras Village has a village institution that involves the village community to participate and contribute to the village institution. The problem in this study is to describe women's participation in the Bongkaras Village Government Institution, because the level of women's participation in Bongkaras Village is still low. The purpose of this study is to examine women's participation in the Bongkaras Village Government Institution. In this study, women's participation in the Bongkaras Village Government Institution is still low. This can be seen from the role, involvement, and representation of women in the management or functional structure of village institutions. In addition, there is a principle that states "Somba marhula hula elek hita marboru" which reflects patriarchy between women and men. Therefore, the author examines how women are represented in the Bongkaras Village Government Institution using Participation Theory and Representation Theory. Research on women's participation in Village Government Institutions conducted in Bongkaras Village is a study that uses qualitative methods. For data collection, researchers conducted direct observation, interviews, and documentation. Data validity using data triangulation and data analysis was carried out in several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, then drawing conclusions from the research results. From the results of the research conducted, it is known that the inhibiting factors for the role and level of participation of women in the Bongkaras Village Government Institution are still low due to several factors including education factors, cultural factors, family factors, factors from women themselves, socialization or direction factors, and local role factors. To catch up, efforts must be made to increase women's participation in the Bongkaras Village Government Institution in order to advance women for the advancement of women in Bongkaras Village.

Article History

Submitted: 4 Maret 2025

Accepted: 11 Maret 2025

Published: 12 Maret 2025

Key Words

Women's Representation, Government Institutions, Bongkaras Village

Abstrak (Indonesia)

Desa Bongkaras merupakan salah satu desa di Kecamatan Silima Pungga-Pungga Provinsi Sumatera Utara. Desa Bongkaras memiliki kelembagaan desa yang melibatkan masyarakat desa untuk berperan serta dan berkontribusi di dalam lembaga desa tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam Lembaga Pemerintahan Desa Bongkaras, karena tingkat partisipasi perempuan di Desa Bongkaras masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam Lembaga Pemerintahan Desa Bongkaras. Dalam penelitian ini, partisipasi perempuan dalam Lembaga Pemerintahan Desa Bongkaras masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari peran, keterlibatan, serta keterwakilan perempuan dalam kepengurusan atau struktur fungsional di lembaga desa. Selain itu adanya prinsip yang menyebutkan "Somba marhula hula elek hita marboru" yang mencerminkan patriarki antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu penulis mengkaji bagaimana keterwakilan perempuan di

Sejarah Artikel

Submitted: 4 Maret 2025

Accepted: 11 Maret 2025

Published: 12 Maret 2025

Kata Kunci

Keterwakilan Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Desa Bongkaras





lembaga Pemerintahan Desa Bongkaras dengan menggunakan Teori Partisipasi dan Teori Representasi. Penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam Lembaga Pemerintahan desa yang dilakukan di Desa Bongkaras merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian dilakukakan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwasanya faktor penghambat peran dan tingkat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan Desa Bongkaras masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor budaya, faktor keluarga, faktor dari diri perempuan sendiri, faktor sosialisasi atau pengarahan, dan faktor peran lokal. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut maka harus upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan Desa Bongkaras guna untuk memajukan perempuan guna kemajuan kaum perempuan Desa Bongkaras.

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif. Di Indonesia, keberadaan perempuan dalam lembaga pemerintahan desa masih terbatas, terutama di daerah yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Desa Bongkaras menjadi contoh nyata di mana jumlah perempuan dalam struktur pemerintahan desa masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah perempuan yang duduk di lembaga pemerintahan desa dalam beberapa periode mengalami peningkatan yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan budaya yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik lokal.

Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa bukan hanya sekedar memenuhi kuota atau representasi simbolik, tetapi lebih dari itu, yakni bagaimana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Keberadaan perempuan dalam struktur pemerintahan memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan perempuan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam realitasnya, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa masih sangat terbatas karena berbagai kendala, baik dari sisi individu perempuan itu sendiri maupun dari lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi mereka.

Salah satu faktor utama yang menghambat keterwakilan perempuan adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, perempuan sering kali dianggap tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk terlibat dalam politik, sehingga peran mereka lebih difokuskan pada ranah domestik. Stereotip gender ini membatasi peluang perempuan untuk terlibat aktif dalam pemerintahan dan menghambat mereka untuk menduduki posisi strategis dalam struktur kelembagaan desa.

Selain faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan perempuan di desa juga menjadi penghambat utama dalam meningkatkan keterwakilan mereka dalam pemerintahan. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran politik dan keterampilan kepemimpinan, namun di banyak desa, perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang layak. Banyak perempuan di Desa Bongkaras hanya memiliki pendidikan hingga tingkat dasar atau menengah pertama, sehingga kurang mendapatkan wawasan yang cukup tentang peran



dan hak-hak politik mereka. Hal ini berakibat pada rendahnya minat perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa serta kurangnya kepercayaan diri mereka untuk bersaing dengan laki-laki dalam pemilihan kepala desa atau perangkat desa.

Kurangnya sosialisasi politik juga menjadi faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Sosialisasi politik sangat penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Namun, di banyak daerah pedesaan, akses perempuan terhadap informasi politik masih sangat terbatas. Tidak adanya program pelatihan kepemimpinan yang secara khusus ditujukan bagi perempuan menyebabkan mereka kurang mendapatkan bekal yang cukup untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan.

Dari sisi ekonomi, perempuan di Desa Bongkaras juga menghadapi kendala yang cukup besar dalam terlibat dalam pemerintahan. Banyak perempuan yang harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah, sehingga waktu dan energi mereka lebih banyak tersita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Beban domestik yang tinggi membuat perempuan kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan aktivitas politik. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat bagi perempuan yang ingin terlibat dalam pemerintahan desa.

Minimnya kebijakan afirmatif juga menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Meskipun secara nasional telah ada berbagai regulasi yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, implementasi di tingkat desa masih sangat terbatas. Tidak adanya kebijakan khusus di tingkat desa yang mengatur tentang kuota minimal keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa membuat partisipasi perempuan masih bersifat sukarela dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih konkret untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan desa.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Peran serta perempuan dalam pemerintahan desa bukan hanya penting untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan Desa Bongkaras secara mendalam. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memahami kondisi sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti kepala desa, anggota perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perempuan yang terlibat atau tidak terlibat dalam pemerintahan desa. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi terkait faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Selain itu, dilakukan observasi terhadap dinamika sosial dalam proses



pengambilan keputusan di desa, serta bagaimana keterlibatan perempuan dalam berbagai forum desa.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi desa, laporan tahunan pemerintahan desa, peraturan terkait keterwakilan perempuan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks historis serta memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di desa untuk mengamati interaksi dalam pengambilan keputusan serta peran perempuan dalam lembaga pemerintahan desa. Wawancara mendalam dengan informan kunci bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai pengalaman, persepsi, serta hambatan yang dihadapi perempuan dalam pemerintahan desa. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip dan dokumen terkait yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan analisis lebih lanjut. Kesimpulan penelitian diambil berdasarkan pola, hubungan, serta temuan utama yang muncul dari analisis data yang telah dikumpulkan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, keakuratan dan konsistensi data dapat diperiksa sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat dipercaya

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan Desa Bongkaras masih sangat rendah. Perempuan yang terlibat dalam pemerintahan desa masih dalam jumlah yang terbatas, dengan peran yang sering kali bersifat administratif atau sekadar pendukung dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa periode pemilihan, jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan posisi dalam pemerintahan desa tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan masih kuatnya hambatan sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam politik lokal.

Faktor-Faktor yang Menghambat Keterwakilan Perempuan

Salah satu faktor utama yang menghambat keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Dalam sistem sosial yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Bongkaras, perempuan masih dianggap memiliki peran utama dalam ranah domestik, sementara laki-laki lebih didorong untuk mengambil peran publik, termasuk dalam pemerintahan desa. Pemikiran ini diwariskan secara turun-temurun, sehingga sulit bagi perempuan untuk menembus struktur kekuasaan yang telah lama didominasi oleh laki-laki.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi terhadap minimnya keterwakilan perempuan. Sebagian besar perempuan di Desa Bongkaras hanya mendapatkan pendidikan dasar atau menengah pertama. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam memahami isu-isu pemerintahan dan kebijakan publik.



Akibatnya, mereka merasa kurang percaya diri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa atau ikut serta dalam diskusi kebijakan desa.

Selain itu, minimnya sosialisasi politik di kalangan perempuan juga menjadi penghambat utama. Tidak banyak program pelatihan atau seminar yang memberikan edukasi tentang politik dan pemerintahan desa bagi perempuan. Akibatnya, perempuan kurang mendapatkan wawasan mengenai hak-hak politik mereka dan bagaimana cara berpartisipasi dalam sistem pemerintahan desa. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam politik masih rendah, baik di kalangan perempuan itu sendiri maupun dalam masyarakat secara umum.

Beban peran ganda yang harus dijalankan oleh perempuan juga menjadi faktor penghambat keterlibatan mereka dalam pemerintahan desa. Sebagian besar perempuan di Desa Bongkaras tidak hanya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, tetapi juga harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan beban kerja yang tinggi, banyak perempuan yang merasa tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam kegiatan politik atau pemerintahan desa. Kondisi ini diperparah dengan minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar bagi perempuan yang ingin terlibat dalam dunia politik.

Dampak Rendahnya Keterwakilan Perempuan

Minimnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa berdampak pada kurangnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Isu-isu yang berkaitan dengan hak perempuan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, sering kali tidak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, banyak kebutuhan dan aspirasi perempuan yang terabaikan.

Ketiadaan perempuan dalam pemerintahan desa juga berpengaruh terhadap kurangnya perspektif gender dalam penyusunan kebijakan desa. Pemerintahan desa yang didominasi oleh laki-laki cenderung memiliki fokus kebijakan yang lebih mengutamakan sektor ekonomi dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan aspek sosial yang lebih luas yang juga berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam pembangunan desa yang seharusnya mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan.

Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa, diperlukan berbagai upaya strategis. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan edukasi politik bagi perempuan. Program pelatihan kepemimpinan dan sosialisasi mengenai sistem pemerintahan desa harus diperbanyak agar perempuan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak politik mereka serta cara berpartisipasi dalam pemerintahan.

Selain itu, pemerintah desa juga perlu menerapkan kebijakan afirmatif yang mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik desa. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah pemberian kuota minimal keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan afirmatif, perempuan akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa.

Pemberdayaan ekonomi perempuan juga harus menjadi prioritas dalam meningkatkan keterwakilan mereka dalam politik desa. Program-program yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka terhadap peran domestik, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam



politik. Dengan adanya dukungan ekonomi, perempuan akan lebih percaya diri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, peran masyarakat dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa juga sangat penting. Sosialisasi yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik harus ditingkatkan agar masyarakat lebih menerima dan mendukung peran perempuan dalam pemerintahan desa. Perubahan pola pikir ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, di mana perempuan didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan politik sejak usia muda.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa dapat meningkat secara signifikan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jika perempuan diberikan kesempatan yang lebih besar dalam pemerintahan desa, maka pembangunan desa yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan Desa Bongkaras disebabkan oleh berbagai faktor, terutama budaya patriarki dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta sosialisasi politik. Keterwakilan perempuan yang rendah berdampak pada kebijakan desa yang kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa, diperlukan berbagai langkah strategis. Pertama, perlu adanya peningkatan edukasi politik bagi perempuan agar mereka lebih memahami hak dan peran mereka dalam pemerintahan. Program pelatihan dan sosialisasi politik harus diadakan secara rutin untuk membangun kesadaran perempuan terhadap pentingnya partisipasi dalam pemerintahan desa. Kedua, pemerintah desa harus menerapkan kebijakan afirmatif, seperti pemberlakuan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan desa. Langkah ini dapat membantu menciptakan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di desa. Ketiga, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi perempuan juga perlu ditingkatkan agar mereka memiliki kapasitas dan kemandirian yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan desa dapat meningkat secara signifikan dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. 2018. Perempuan dan Politik (Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019) (Doctoral dissertation, Tesis Pascasarjana Ilmu Politik, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya).
- Azis, A. 2012. Perempuan di persimpangan parlemen: Studi dalam perspektif politik hukum. Rangkap Education.
- Barus, V. C. B. 2020. Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Damayanti, T. 2021. Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024) (Doctoral dissertation, UPT. PERPUSTAKAAN).



- FARIYATIN, F. (2019). KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Hervina, A., Hertanto, H., & Warganegara, A. 2021. Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 1(2), 35-42.
- Kaloko, F. A. 2023. REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAIRI PERIODE 2019-2024 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Marijan, K. 1999. *The Study of Political Culture in Indonesia. Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. th. XII, (2), 57-66.
- Muhliza, N., Risal, M. C., & Umar, K. (2023). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH*, 4(3), 294-310.
- Phillips, A. 1998. *The politics of presence*. OUP Oxford.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. 2015. Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173-181.
- Nurcholis, H. T., Pemerintah, P., & Daerah, O. 2007. Grasindo. Jakarta. 2005.
- Paramesti, A., Lutfi, A., Hutasoit, O. B. Y., Mansoer, M. F., & Rahmawati, R. (2024). Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(01), 51-69.
- Parhusip, P. T., & Girsang, C. (2023). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BONGKARAS KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA, KABUPATEN DAIRI". *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 136-154.
- Priandi, R., & Roisah, K. 2019. Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Prawira, I. N. A. J., Bandiyah, B., & Azhar, M. A. Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh Periode